EVALUASI PENGANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Andin Arfi Aurellia[1], Elisa Saputri[2], Revienda Anita Fitrie[3], Eva Hany Fanida[4]

[1,2.3.4]*Universitas Negeri Surabaya*
E-mail : 25040674264@mhs.unesa.ac.id[1] , 25040674244@mhs.unesa.ac.id[2],
reviendafitrie@unesa.ac.id[3], evafanida@unesa.ac.id[4]

ABSTRACT

This research aims to evaluate the performance of regional spending budgeting in the Banyuwangi Regency APBD for the 2025 Fiscal Year. The method used is a descriptive qualitative approach with logic model analysis through the study of literature and official local government documents. The research results show that the APBD structure is still dominated by operational spending, especially employee spending and goods/services, while the portion of capital spending is relatively smaller. The realization of regional income is classified as high and almost reaching the target, but the realization of spending until the end of the year is not optimal and tends to accumulate at the end of the period. However, regional financial performance in general is classified as good, shown by the achievement of macro indicators such as increasing IPM, economic growth, and reducing poverty. In conclusion, budget management has been administratively effective, but it still needs to be improved in terms of efficiency, equitable allocation, and quality of program implementation so that it has a greater impact on sustainable development.

Keywords : *APBD, Spending, Region, Effectiveness, Evaluation, Banyuwangi.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penganggaran belanja daerah pada APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis *logic model* melalui studi literatur dan dokumen resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur APBD masih didominasi oleh belanja operasional, khususnya belanja pegawai dan barang/jasa, sementara porsi belanja modal relatif lebih kecil. Realisasi pendapatan daerah tergolong tinggi dan hampir mencapai target, namun realisasi belanja hingga akhir tahun belum optimal dan cenderung menumpuk pada periode akhir. Meskipun demikian, kinerja keuangan daerah secara umum tergolong baik, ditunjukkan dengan capaian indikator makro seperti peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Kesimpulannya, pengelolaan anggaran telah berjalan efektif secara administratif, tetapi masih perlu peningkatan pada aspek efisiensi, pemerataan alokasi, dan kualitas pelaksanaan program agar lebih berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci : *APBD, Belanja, Daerah, Efektivitas, Evaluasi, Banyuwangi.*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD bukan hanya sekadar dokumen keuangan tahunan, tetapi menjadi cerminan arah kebijakan pembangunan, prioritas program, serta komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Halim, 2019). Melalui APBD, pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya publik untuk membiayai pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, belanja aparatur, serta berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kualitas penganggaran daerah sangat menentukan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia, pengelolaan APBD diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri, 2020). Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab (Mardiasmo, 2018). Artinya, pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk membelanjakan anggaran sesuai aturan, tetapi juga memastikan bahwa belanja tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan APBD dengan struktur sebagai berikut: Pendapatan Daerah: Rp 3.473.138.810.162,00; Belanja Daerah: Rp 3.406.619.564.936,00; Penerimaan Pembiayaan: Rp 22.369.643.662,00; Pengeluaran Pembiayaan: Rp 88.888.888.888,00; Pembiayaan Netto: minus Rp 66.519.245.226,00; Dari sisi pendapatan, komposisi APBD 2025 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 702.306.550.833,00. Sisanya berasal dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun PAD Banyuwangi tergolong cukup besar secara nominal (lebih dari Rp 700 miliar), kontribusinya masih lebih kecil dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa kapasitas fiskal daerah masih bergantung pada kebijakan fiskal nasional. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kondisi ini menjadi tantangan karena semakin tinggi ketergantungan terhadap dana transfer, semakin terbatas fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

Dalam pelaksanaannya, realisasi APBD 2025 menunjukkan dinamika yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Hingga November 2025, realisasi belanja daerah tercatat sebesar: Rp 2.191,86 miliar atau sekitar 56,21% dari total pagu belanja Rp 3.899,61 miliar (setelah perubahan APBD). Rincian realisasi belanja tersebut meliputi Belanja Pegawai: Rp 885,58 miliar; Belanja Barang dan Jasa: Rp 587,60 miliar; Belanja Lainnya: Rp 426,81 miliar; Belanja Modal: Rp 291,88 miliar. Sementara itu, dari sisi pendapatan, realisasi per akhir Desember 2025 mencapai Rp 3.330,91 miliar atau 96,82% dari target sekitar Rp 3.440,40 miliar. Dengan rincian: Pendapatan Transfer: Rp 2.435,56 miliar, PAD: Rp 673,21 miliar, Lain-lain Pendapatan: Rp 222,14 miliar

Secara umum, angka tersebut menunjukkan bahwa target pendapatan hampir tercapai, tetapi realisasi belanja hingga November masih berada di kisaran 56%. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah perencanaan dan pelaksanaan anggaran sudah berjalan efektif? Mengapa terdapat selisih yang cukup besar antara target dan realisasi belanja pada periode tersebut?

Dalam teori pengelolaan keuangan publik, kinerja belanja daerah tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi harus dilihat dari efektivitas dan dampaknya terhadap

pembangunan. Misalnya, apakah belanja modal benar-benar meningkatkan kualitas infrastruktur? Apakah belanja pendidikan dan kesehatan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik? Apakah belanja sosial mampu menurunkan angka kemiskinan?

Jika dilihat dari komposisi realisasi belanja, belanja pegawai dan belanja barang/jasa masih mendominasi dibandingkan belanja modal. Padahal, belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan jangka panjang seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan infrastruktur publik lainnya. Ketidakseimbangan ini berpotensi menimbulkan gap antara tujuan pembangunan jangka panjang dengan alokasi anggaran yang tersedia. Selain itu, pola penyerapan anggaran yang belum optimal hingga triwulan akhir sering menjadi masalah klasik dalam pengelolaan APBD di berbagai daerah. Penyerapan anggaran yang lambat pada awal tahun dan menumpuk di akhir tahun (spending rush) berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan program karena pengerjaan dilakukan terburu-buru. Hal ini dapat memengaruhi kualitas hasil pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran.

Permasalahan tersebut merupakan isu publik (public problem) karena penggunaan anggaran daerah bersumber dari pendapatan masyarakat dan transfer pusat/provinsi, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh warga melalui kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur permukiman, maupun pemberdayaan ekonomi lokal. Ketidakefektifan alokasi anggaran atau realisasi belanja yang kurang optimal dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan output yang dihasilkan pemerintah daerah, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan membatasi pencapaian target pembangunan strategis daerah.

Dalam konteks itulah evaluasi kinerja belanja daerah menjadi penting. Pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kapasitas perencanaan sektor prioritas, serta memperbaiki mekanisme pelaksanaan dan pengawasan agar belanja daerah tidak hanya sesuai dengan aturan tetapi juga efektif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun demikian, opini WTP tidak secara otomatis menjamin bahwa belanja daerah telah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi harus diperluas pada aspek kinerja dan dampak kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada evaluasi kinerja belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputiBagaimana struktur dan komposisi APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025?Sejauh mana realisasi belanja daerah telah sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi?Apakah terdapat kesenjangan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan di lapangan?Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kinerja belanja daerah pada tahun tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Formulasi dan Implementasi Kebijakan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 dari perspektif kinerja belanja daerah, termasuk efektivitas alokasi anggaran dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya memberikan gambaran administratif tetapi juga rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas

penganggaran, tata kelola keuangan, dan outcome pembangunan secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai sejauh mana penganggaran daerah di Kabupaten Banyuwangi telah mencerminkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan orientasi hasil. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna memperkuat kinerja belanja daerah sebagai instrumen utama pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai pendekatan utama dalam mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kinerja anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2025. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis lebih dalam dengan studi literatur dan analisis dokumen perencanaan laporan keuangan. Analisis yang dipilih dalam penelitian ini adalah analisis Logic Model, yang terhubung dengan evaluasi alur logis dari input, proses, output, hingga outcome (dampak). Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam dinamika pelaksanaan penganggaran, efektivitas dan efisiensi pengeluaran penganggaran, serta tantangan dan peluang dalam pengelolaan penganggaran.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen - dokumen resmi Pemerintahan Daerah Banyuwangi yang diakses melalui Portal Banyuwangi, dan laporan resmi dokumen SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) dipublikasi oleh DJPK (Direktorat Jenderal Pengimbangan Keuangan) Kementrian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2025. Di sisi lain, referensi teoritis dan analisis laporan penganggaran diperoleh dari buku - buku akademik (pendekatan dari teoritis), jurnal ilmiah nasional, serta artikel yang berfokus pada laporan penganggaran dan dampak (hasil dan akibat) pengeluaran belanja daerah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan Logic Model upaya menelaah lebih dalam penggambaran alur APBD dan identifikasi permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan anggaran. Analisis ini dilaksanakan menggunakan penelusuran pustaka yang memanfaatkan perpustakaan digital, jurnal nasional melalui Google Schoolar, serta dokumen - dokumen elektronik yang dipublikasi melalui situs resmi Pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sehingga masih relevan sesuai dengan kondisi terkini.

Dengan pendekatan Logic Model, peneliti mampu memahami alur penganggaran keuangan yang didapatkan dan dikeluarkan serta mengidentifikasi masalah dan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Pengumpulan data dilakukan secara studi literatur mandiri melalui perpustakaan digital tidak melalukan wawancara tetapi validitas tetap terjaga karena menggunakan prinsip objektivitas dokumen - dokumen yang di teliti dapat dipertanggungjawabkan dan prinsip sistematis pemilihan dokumen harus relevan dan dipilih secara sadar paling akurat. Kelebihan menggunakan metode ini adalah memastikan keberhasilan penganggaran belanja daerah sekaligus memberikan pemikiran konseptual dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Hasil dari studi literatur ini diharapkan dapat memberikan gambaran akuntabilitas dan transparansi setiap penganggaran yang dikeluarkan secara efektivitas dan efisiensi yang di laksanakan oleh APBD di Kebupaten Banyuwangi. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi setiap penganggaran yang dikeluarkan

dalam rangka memastikan keberhasilan kebijakan keuangan, menghindari penyalahgunaan anggaran belanja daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik dari masyarakat. Dengan demikian, metode dalam penelitian ini menjadi alat penting untuk menggali, mengidentifikasi, dan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang bertujuan untuk merumuskan keberhasilan pelaksanaan penganggaran APBD dan solusi terhadap permasalahan tata kelola keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025, Bupati Banyuwangi telah mengeluarkan beberapa pasal Peraturan Daerah. Pasal 2 berisi tentang APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kemudian disusul pasal 3 berisi APBD tahun anggaran 2025 yang dirinci sebagai berikut:

i. Pendapatan Daerah Rp. 3.473.138.810.162,00
ii. Belanja Daerah Rp. 3.406.619.564.936,00
Surplus Rp. 66.519.245.226,00
iii. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 22.369.643.662,00
2. Pengeluaran Rp. 88.888.888.888,00
Pembiayaan Netto Rp. 66.519.245.226,00

Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana seperti yang tertulis diatas bersumber dari pendapatan Asli Daerah, pendapatan Transfer, dan pendapatan lain-lain Daerah yang sah. Sementara itu, pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam pendapatan Daerah, bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Tabel 1. Klasifikasi Rencana Anggaran Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025

Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran
Pendapatan Asli Daerah	
a. Pajak Daerah	Rp. 362.065.550.833,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 279.407.750.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp. 24.950.000.000,00
d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah	Rp. 35.883.250.000,00
Pendapatan Transfer	
a. Pendapatan Transfer Pusat	Rp. 2.637.074.890.000,00
b. Pendapatan Transfer antar Daerah	Rp. 82.508.627.336,00
Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 51.248.741.993,00
Anggaran Belanja Daerah	
a. Belanja Operasi	Rp. 2.517.808.246.717,00
b. Belanja Pegawai	Rp. 1.457. 596.058.765,00
c. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 874.745.193.988,00
d. Belanja Bunga	Rp. 43.412.962.964,00

	Sumber Anggaran	Jumlah Anggaran
e.	Belanja Hibah	Rp. 126.893.706.000,00
f.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 15.160.325.000,00
g.	Belanja Modal	Rp. 438.108.133.619,00

Komponen Belanja (klasifikasi ekonomi)

Struktur belanja Kabupaten Banyuwangi masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada belanja rutin untuk menjaga operasional pemerintahan. Pada anggaran tahun 2024, dari total pagu belanja sebesar Rp3,72 triliun, porsi belanja operasi (pegawai dan barang/jasa) menyerap dana paling besar, yakni terealisasi hingga Rp2,36 triliun (91,47% dari pagunya). Untuk proyeksi tahun 2025, belanja pegawai saja diperkirakan memakan porsi sekitar 39% dari total APBD, yang sempat menjadi sorotan legislatif karena melampaui batas ideal belanja pegawai sebesar 30% sesuai regulasi nasional.

Di sisi lain, belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti gedung, jalan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp616,23 miliar pada tahun 2025. Meski porsinya lebih kecil dibandingkan operasional, pemerintah daerah tetap menjaga ketersediaan dana tak terduga sebesar Rp20 miliar untuk penanganan bencana atau keperluan mendesak. Sementara itu, belanja transfer yang ditujukan bagi pemerintah desa tercatat terealisasi cukup lancar guna memastikan dana pembangunan di tingkat desa tetap mengalir sesuai kebutuhan local.

Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Berdasarkan Laporan Transaksi Kas Daerah.

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Pendapatan Daerah			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	740.306.550.833,00	543.311.907.218,82	196.994.643.614,18
a. Pajak Daerah	375.065.550.833,00	456.339.537.448,00	(81.273.986.615,00)
b. Retribusi Daerah	305.954.314.200,00	50.646.300.707,31	255.308.013.492,69
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.950.000.000,00	24.945.876.115,94	4.123.884,06
d. Lain-lain PAD yang Sah	34.336.685.800,00	11.380.192.947,57	22.956.492.852,43
Pendapatan Transfer	2.674.239.140.336,00	2.061.437.394.522,00	612.801.745.814,00
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.570.683.109.000,00	1.882.654.174.072,00	688.028.934.928,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.556.031.336,00	178.783.220.450,00	(75.227.189.114,00)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	51.248.741.993,00	28.583.025.742,77	22.665.716.250,23
a. Lain-lain	51.248.741.993,00	28.583.025.742,77	22.665.716.250,23

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
Belanja Daerah			
Belanja Operasi	2.730.303.024.909,71	1.727.278.526.139,70	1.003.024.498.770,01
a. Belanja Pegawai	1.356.179.793.363,60	939.139.690.378,94	417.040.102.984,66
b. Belanja Barang dan Jasa	1.191.005.762.278,11	743.064.861.286,76	447.940.900.991,35
c. Belanja Bunga	7.795.188.268,00	5.006.513.474,00	2.788.674.794,00
d. Belanja Hibah	159.281.956.000,00	27.635.686.000,00	131.646.270.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial	16.040.325.000,00	12.431.775.000,00	3.608.550.000,00
Belanja Modal	791.151.995.577,17	657.746.846.498,30	133.405.149.078,87
a. Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.700.022.058,00	98.534.334.825,00	25.165.687.233,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	178.903.141.886,17	123.212.702.283,22	55.690.439.602,95
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	482.306.323.733,00	433.975.605.109,08	48.330.718.623,92
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.177.698.900,00	207.905.400,00	1.969.793.500,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya	4.064.809.000,00	1.816.298.881,00	2.248.510.119,00
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	19.918.286.400,00	81.713.600,00
a. Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	19.918.286.400,00	81.713.600,00
Belanja Transfer	429.353.184.600,00	189.462.088.811,00	239.891.095.789,00
a. Belanja Bagi Hasil	20.193.959.600,00	20.193.959.600,00	0,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	409.159.225.000,00	169.268.129.211,00	239.891.095.789,00
Jumlah Belanja Daerah	3.970.808.205.086,88	2.594.405.747.849,00	1.376.402.457.237,88
Surplus/(Defisit)	(505.013.771.924,88)	38.926.579.634,59	543.940.351.559,47

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	585.544.362.924,88	179.861.273.247,77	405.683.089.677,11
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.211.779.924,88	53.528.690.247,77	35.683.089.677,11
b. Penerimaan Pinjaman Daerah	496.332.583.000,00	126.332.583.000,00	370.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	126.332.583.000,00	126.332.583.000,00	0,00
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	126.332.583.000,00	126.332.583.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	459.211.779.924,88	53.528.690.247,77	405.683.089.677,11
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(45.801.992.000,00)	92.455.269.882,36	46.653.277.882,36

Analisis Rasio Anggaran (Metode Evaluasi)

Evaluasi terhadap rasio keuangan menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi mampu menjaga disiplin fiskal yang kuat. Rasio varian belanja menunjukkan performa positif, di mana realisasi belanja tahun 2024 mencapai 89% dari target, yang ketika disandingkan dengan pendapatan daerah menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp51,95 miliar. Pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 3,37 triliun melampaui target anggaran sebesar Rp. 3,30 triliun. Pendapatan ini didorong oleh realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Kinerja yang positif juga terindikasi pada sektor pajak Daerah yang mampu melampaui target dengan realisasi Rp. 298,51 miliar. Efisiensi juga terlihat pada pos belanja tidak terduga yang hanya terealisasi sebesar Rp 465,33 juta dari anggaran Rp 20 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan belanja yang melebihi kemampuan penerimaannya, sehingga mampu mencatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp89,21 miliar.

Meskipun kinerja keuangan tahun anggaran 2024 Kabupaten Banyuwangi dinilai positif, menyatakan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 tidak kalah baik dari tahun 2024. Hasil ini dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka kemiskinan, APBD 2025 naik menjadi Rp. 3,89 triliun, dan Belanja Daerah sebesar Rp. 3,40 triliun. Efektivitas belanja terlihat hingga November 2025 belanja mencapai 56,21% setara Rp. 2.191,86 miliar mencakup belanja pegawai, barang/jasa, dan modal. Hal ini juga memperbaiki rasio gini menjadi lebih baik dari tahun 2024 karena menunjukkan distribusi anggaran yang lebih merata dan terhindar dari ketimpangan. Hingga Maret 2026 tercatat sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar Rp. 319,8 miliar.

Mengenai rasio pertumbuhan, APBD Banyuwangi cenderung dinamis mengikuti perubahan kebijakan pusat. Di tahun 2025, terjadi sedikit penyesuaian belanja sebesar 0,67% akibat pemangkasan dana transfer pusat, namun total proyeksi anggaran tetap berada di kisaran Rp3,89 triliun melalui penyesuaian pendapatan daerah. Tantangan terbesar dalam rasio keserasian adalah masih tingginya ketimpangan antara belanja operasional yang mencapai lebih dari 70% total belanja dibandingkan dengan belanja modal yang masih di bawah angka ideal 20%, sebuah catatan yang terus dievaluasi oleh DPRD untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.

Evaluasi Kinerja

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, tercatat Belanja Daerah terkendali dari target anggaran yang di tetapkan sehingga Kabupaten Banyuwangi masih memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan dan pembangunan program menunjukkan efektivitas dan efisiensi.

Fokus anggaran Kabupaten Banyuwangi tahun 2025 mengusung tema "Penguatan Ekosistem Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mendukung Transformasi Ekonomi Berkelanjutan". Tema ini memaparkan delapan program prioritas Kabupaten Banyuwangi, antara lain yaitu :

a. Pengentasan kemiskinan
b. Perluasan lapangan kerja
c. Peningkatan kualitas kesehatan
d. Meningkatkan ekosistem produktif bagi pelaku pariwisata, UMKM, dan pertanian
e. Menguatkan mosal sosial pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
f. Transformasi digital layanan publik
g. Pengembangan infrastruktur

Penguatan pelaksanaan delapan program ini dapat mendorong pembangunan yang inklusif, menguatkan daya saing ekonomi yang menyejahterakan masyarakat.

Dilihat dari sisi kemanfaatan anggaran, belanja daerah Banyuwangi berhasil mencapai indikator makro yang sangat baik di atas rata-rata nasional. Beberapa dinas seperti Bappeda mencatat realisasi belanja program di atas 90% dengan program perencanaan dan evaluasi mencapai 99,34%. Output utama terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang melampaui target hingga 102,40% pada tahun 2024. Sementara itu, dari sisi outcome (dampak), anggaran tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, terbukti dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 74,30 pada tahun 2024, naik dari tahun sebelumnya sebesar 73,79.

Keberhasilan kinerja ini juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sebesar 5,65% dan penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan dari 7,34% menjadi 6,54%, serta penurunan kemiskinan ekstrem ke angka 0,29%. Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah penurunan Gini Ratio (indeks ketimpangan) yang turun dari 0,351 menjadi 0,312 pada tahun 2024, yang merupakan angka ketimpangan terendah di daerah ini dalam empat tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga berdampak pada pemerataan ekonomi di masyarakat.

Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil memperoleh apresiasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kemendagri. Kabupaten Banyuwangi mendapatkan predikat "Kinerja Tinggi" dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD). Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya Kabupaten yang mendapat penghargaan pada tingkat nasional tertinggi pada tahun 2025 dengan skor 82,92 jauh di atas nilai terendah yaitu 23,24. Penghargaan ini diberikan melalui evaluasi tata kelola kinerja yang dimulai dari Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. hingga Monitoring Center for Prevention. Oleh karena itu, Kabupaten Banyuwangi sukses menyelenggarakan kinerja nya dengan efektif, efisien, dan berdampak bagi masyarakatnya.

Bupati menegaskan bahwa perwujudan hal tersebut hasil dari kerja keras seluruh stakehlolders di Kabupaten Banyuwangi melalui perrmuan rutin setiap pekan Weekly Meeting dengan seluruh organisasi Perangkat Daerah hingga camat untuk menyampaikan persoalan kinerja yang sedang dijalankan supaya dapat terindikasi jika terdapat resiko kegagalan suatu program.

Kepatuhan dan Transparansi

Aspek akuntabilitas merupakan keunggulan utama pengelolaan keuangan di Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara konsisten mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 13 tahun berturut-turut, termasuk untuk laporan keuangan tahun 2024. Pencapaian ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi anggaran dijalankan melalui pengawasan berkala per triwulan dan penggunaan sistem digital dalam pengelolaan kas daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberi akses digital kepada publik dalam mewujudkan tata kelola yang terbuka sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi dengan meningkatkan kepercayaan publik melalui laman portal resmi PemKab Banyuwangi "Transparani Anggaran Kabupaten Banyuwangi". Laman tersebut berisi informasi terkait realisasi penggunaan keuangan daerah per tahun yang dapat dipantau secara daring oleh publik. Transparansi ini merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi dalam pengawasan pengelolaan keuangan sehingga pemerintah mampu melaksanakan kinerja nya dengan baik, lebih responsif, efisien sebab dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penganggaran daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dari administratif yang ditandai dengan tingginya realisasi pendapatan daerah serta terjaga disiplin fiskal sehingga SILPA Kabupaten Banyuwangi masih terbilang banyak. Selain itu, capaian indikator makro seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa anggaran daerah telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan aggaran terutama pada aspek efisiensi dan kuliatas belanja. Struktur belanja yang masih didominasi oleh belanja Operasional seperti belanja pegawai dan barang atau jasa menyebabkan volume belanja modal relatif rendah sehingga berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang.

Selain itu, pola realisasi belanja yang belum optimal cenderung menumpuk di akhir atahun menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan program.

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan pelaksanaan anggaran yang lebih produktif, mempercepat penyerapan anggaran secada merata sepanjang tahun dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberikan manfaaf yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan APBD tidak hanya akuntabel dan transparan pada bagian administratif melainkan mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan daerah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News. (2024). Bupati sebut IPM Banyuwangi 2024 naik jadi 74,30. Diakses dari https://jatim.antaranews.com/berita/895533/bupati-sebut-ipm-banyuwangi-2024-naik-jadi-7430

Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). Pemkab Banyuwangi raih surplus anggaran Rp 519,5 miliar dalam laporan APBD 2024. Diakses dari https://jatim.bpk.go.id/dari-media/pemkab-banyuwangi-raih-surplus-anggaran-rp-5195-miliar-dalam-laporan-apbd-2024/

Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Diakses dari https://banyuwangikab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/12/02/199/indeks-pembangunan-manusia--ipm---kabupaten-banyuwangi-tahun-2024.html

Databoks Katadata. (2025). Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id

JDIH Kabupaten Banyuwangi. (2025). Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2025. Diakses dari https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/analisis_evaluasi/EVALUASI_PERDA_1_th_2025.pdf

Katadata. (2025). Realisasi belanja daerah Pemkab Banyuwangi per November 2025. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/9f4038e43ca3232/realisasi-belanja-daerah-pemkab-banyuwangi-per-november-2025

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Kemendagri.

Kominfo Jawa Timur. (2024). 13 tahun berturut Banyuwangi kembali raih WTP. Diakses dari https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/13-tahun-berturut-banyuwangi-kembali-raih-wtp

Lensa Indonesia. (2025). APBD Banyuwangi 2025 disahkan cakup delapan program prioritas. Diakses dari https://www.lensaindonesia.com/apbd-banyuwangi-2025-disahkan-cakup-delapan-program-prioritas/

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.

Ngopibareng. (2024). Paripurna LKPJ: Bupati sampaikan capaian kinerja Pemkab Banyuwangi selama tahun 2024. Diakses dari https://www.ngopibareng.id/read/paripurna-lkpj-bupati-sampaikan-capaian-kinerja-pemkab-banyuwangi-selama-tahun-2024

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2024). Dokumen anggaran daerah. Diakses dari https://banyuwangikab.go.id/media/anggaran/pdf/yjhexrgdwx_19-november.pdf

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Banyuwangi: Pemkab Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2024). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025. Banyuwangi: Bappeda Banyuwangi.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2024). RLPPD Kabupaten Banyuwangi 2024. Diakses dari https://banyuwangikab.go.id/uploads/media/pdf/RLPPD_2024.pdf

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2024). Tata kelola pemerintahan terbaik, Pemkab Banyuwangi raih award Mendagri. Diakses dari https://banyuwangikab.go.id/berita/tata-kelola-pemerintahan-terbaik-pemkab-banyuwangi-raih-award-mendagri

PPID Banyuwangi. (2025). Banyuwangi transparan, realisasi anggaran 2025 dapat diakses secara langsung oleh publik. Diakses dari https://ppid.banyuwangikab.go.id/home/news_detail/banyuwangi-transparan-realisasi-anggaran-2025-dapat-diakses-secara-langsung-oleh-publik

RRI. (2024). Banyuwangi raih WTP ke-13 kali dari BPK. Diakses dari https://rri.co.id/jember/regional/1457194/banyuwangi-raih-wtp-ke-13-kali-dari-bpk